

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Definisi dan Pengertian

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Yoeti, 1996:118).

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek, dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata (Undang-undang RI No. 9 tahun 1990, pasal 1).

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan, disebutkan dalam pasal 1 ayat 5, bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha barang pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

Menurut Salah Wahab (Pendid, 1994:34), pariwisata salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang lengkap, ia juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya, seperti industri kerajinan tangan cendera mata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri.

2.1.2 Pengertian wisatawan

Wisatawan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kegiatan kepariwisataan. Minat wisatawan dapat ditingkatkan disamping dengan memperbaiki prasarana dan sarana wisata, pengelola usaha perlu mengetahui motivasi wisatawan berkunjung ke suatu obyek wisata. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan kepariwisataan di Indonesia, pemerintah telah merumuskan batasan tentang wisatawan,

seperti yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969 yang memberikan definisi wisatawan (tourist) adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungannya itu (Yoeti, 1996:142).

Wisatawan adalah seseorang atau setiap orang yang mengadakan perjalanan selama 24 jam atau lebih ke suatu negara yang bukan tempat tinggalnya, dengan tujuan untuk menggunakan waktu senggang baik untuk rekreasi atau berlibur, untuk keperluan kesehatan, untuk menjalankan ibadah, maupun untuk olahraga. Disamping itu untuk keperluan usaha kunjungan keluarga, menjalankan tugas-tugas dan lain-lain (Pendit, 1994:48).

Sedangkan menurut P.W Ogilive, seorang ahli kepariwisataan Inggris menyebutkan bahwa wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat, pertama mereka meninggalkan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan kedua bahwa sementara mereka pergi, mereka mengeluarkan uang di tempat yang mereka kunjungi tidak dengan mencari nafkah di tempat tersebut (Yoeti, 1996:141)

Berdasarkan definisi dan pengertian wisatawan yang telah disebutkan diatas, ciri utama wisatawan adalah sebagai berikut :

1. melakukan perjalanan dengan meninggalkan tempat kediamannya menuju tempat lain,
2. melakukan perjalanan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun, dan
3. tujuan dari perjalanan untuk menikmati perjalanan dan kunjungan, bukan untuk mencari nafkah.

2.1.3 Pengertian industri pariwisata

Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri suatu serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya. Sebagai suatu industri di Indonesia, pemerintah memberikan definisi mengenai industri pariwisata melalui Instruksi Presiden R.I No. 9 Tahun 1969 pada tanggal 6 Agustus 1969, dimana dalam Bab II pasal 3 menyebutkan bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “*industri pariwisata*” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara (Yoeti, 1996:151).

Menurut Yoeti (1996:153), industri pariwisata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa (*goods and service*) yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanannya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka selain obyek wisata itu sendiri, perusahaan-perusahaan yang dapat dikelompokkan dalam industri pariwisata, yaitu :

- travel agent
- tourist transportation
- hotel dan akomodasi lainnya
- catering trade (bar & restaurant, dan lainnya)
- tour operator
- souvenir shop dan handicraft center.

2.1.4 Pengertian obyek wisata

Banyak obyek yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Hal ini tergantung dari tujuan kegiatan wisata yang dilakukan. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Selanjutnya obyek dan daya tarik wisata dapat dibagi menjadi :

1. Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, flora dan fauna
2. Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata argo, wisata yasa, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. Selain itu dikenal juga obyek dan daya tarik wisata lain yang berdimensi budaya, misalnya : tari-tarian, sandiwara, drama, upacara-upacara penting keagamaan, dan sebagainya. (Undang-undang No. 9 tahun 1990).

2.2 Hukum dan Perundangan Kepariwisataan

Faktor utama yang sangat menentukan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan adalah kepastian hukum. Kepariwisataan merupakan kegiatan bisnis yang berdimensi internasional sehingga kepastian hukum menjadi suatu keharusan. Apabila suatu saat terjadi perselisihan (*dispute*) antara pihak Indonesia dan mitranya (pihak asing), maka akan semakin rumit, karena akan terkait dengan hukum yang multi

nasional. Indonesia yang memiliki banyak destinasi objek wisata memiliki kejelasan misi dan visi tahun 2005-2009, antara lain :

Misi

1. Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur.
2. Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global.
3. Melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan akuntabel.

Kebijakan

1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata
2. Meningkatkan efektifitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata
3. Memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata
4. Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata

2.2.1 Undang-Undang

Dalam perundangannya yang dimiliki pertama kalinya yaitu UU No. 9 Tahun 1990 mengatur tentang tiga hal pokok antara lain:

1. Obyek Wisata
 - Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
 - Obyek dan Daya Tarik Budaya
 - Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus
2. Sarana Pariwisata
 - Sarana Akomodasi
 - Sarana makan dan minum
 - Sarana angkutan wisata
 - Sarana wisata tirta
 - Kawasan pariwisata
3. Jasa Pariwisata
 - Jasa biro perjalanan wisata
 - Jasa agen perjalanan wisata

- Jasa pramuwisata
- Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran
- Jasa impresariat
- Jasa konsultan pariwisata
- Jasa informasi

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan pariwisata itu sendiri yaitu untuk:

- Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata
- Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa
- Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
- Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
- Mendorong pendaya gunaan produksi nasional

2.2.2 Peraturan Pemerintah

Adapun Peraturan pemerintah pertama yang berkaitan juga dengan pengaturan bidang kepariwisataan antara lain yaitu :

1. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1979.
Peraturan ini tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada kepala Daerah tingkat I. Terdapat 12 urusan pariwisata yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah tingkat I.
2. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1999 tentang Benda Cagar Budaya yang terdiri dari 47 pasal.
3. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang sangat penting dalam hal kelangsungan hidup manusia, termasuk kegiatan pariwisata.
4. Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang penting dari segi pembangunan, khususnya pengembangan pariwisata. PP ini merupakan tindak lanjut dari UU No.23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan pengganti PP No.51 tahun 1993 tentang AMDALH yang dianggap sudah ketinggalan.
5. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

6. Keputusan dan Instruksi Presiden

2.2.3 Keputusan dan Instruksi Presiden

Terdapatnya Keputusan dan Instruksi Presiden yang juga berkaitan dengan kepariwisataan, yaitu :

1. Keputusan Presiden No.30 tahun 1969

Kepres tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional. Hanya terdiri dari 8 pasal antara lain:

- Kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan nasional ditetapkan oleh Presiden
- Dalam menetapkan kebijaksanaan umum, Presiden dibantu oleh sebuah Dewan Pertimbangan Kepariwisata Nasional.

2. Keputusan Presiden No.15 tahun 1983

Kepres tentang kebijakan Pengembangan Kepariwisata yang pada dasarnya menetapkan tiga hal:

- Pemberian fasilitas bebas visa bagi wisatawan mancanegara
- Penambahan pintu-pintu masuk udara dan laut.
- Pemberian keringanan kepada usaha-usaha pariwisata.
- Pemberian kemudahan pelayanan kepada wisatawan.

3. Keputusan Presiden No.60 tahun 1992 tentang Dekade kunjungan wisata dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2000.

4. Instruksi Presiden

- Inpres No.9 tahun 1969 tentang Pedoman dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah dan Membina Pengembangan kepariwisataan Nasional.
- Inpres No.3 tahun 1985 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.
- Inpres No.5 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata.
- Inpres No.3 tahun 1989 tentang Kunjungan Wisata Indonesia tahun 1991

5. Keputusan Menteri dan Dirjen

2.3 Komponen Pariwisata

Kegiatan pariwisata mencakup dua komponen utama yaitu sediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*). Komponen sediaan merupakan produk wisata yang dapat ditawarkan, yang meliputi obyek wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, serta sarana dan prasarana lingkungan. Komponen permintaan mencakup kegiatan serta aspirasi wisatawan dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata.

2.3.1 Komponen sediaan (*supply*)

1. Obyek dan atraksi wisata

Dalam dunia kepariwisataan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut 'atraksi', atau lazim pula dinamakan 'obyek wisata' (Pendit, 1980).

Keberadaan suatu pantai mampu mendorong orang untuk berkunjung, dimana hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor potensial yang dimiliki oleh kawasan wisata pantai. Banyak yang dapat menarik orang untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Marrioti, 1977) :

1. Benda-benda yang tersedia di alam semesta.
 - a. Iklim, misalnya cuaca cerah (clean air), banyak cahaya matahari (sunny day), sejuk(mild), kering (dry), panas (hot), hujan (wet), dan sebagainya.
 - b. Bentuk tanah dan pemandangan (land configuration and landscape), tanah datar (plains), lembah pegunungan (scenic mountain), air terjun (water fall), gunung berapi (volcanos), dan pemandangan yang menarik (panoramic views).
 - c. Pusat-pusat kesehatan (health center), sumber air mineral (natural spring of mineral water), mandi lumpur (mud baths) atau sumber air panas (hot spring) dimana semua itu diharapkan dapat menyembuhkan macam-macam penyakit.
2. Hasil karya manusia.
 - a. Monumen bersejarah dan sisa peradaban masa lalu
 - b. Museum, *art gallery*, perpustakaan, kesenian rakyat, *handycraft*
 - c. Acara tradisional, pameran, festival, upacara naik haji, upacara pernikahan dan lain-lain. Upacara tradisional ini memang salah satu potensi wisata budaya yang hampir setiap tahun dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Watu Ulo.
 - d. Rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, kuil atau candi, maupun pura.
3. Tata cara hidup masyarakat.

Tata cara hidup tradisional dari suatu masyarakat merupakan salah satu sumber yang amat penting untuk ditawarkan kepada wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya, semuanya merupakan daya tarik bagi para wisatawan.

Dalam kegiatan pariwisata atraksi-atraksi ini harus dikoordinasikan dalam suatu panduan penyajian atraksi yang harmonis, menarik, dan mengagumkan (Pendit, 1980).

Menurut Inskeep, 1991 : 76, tahap penelitian dan mengevaluasi obyek wisata, pemahaman jenis-jenis daya tarik dan aktivitas wisata yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan wisata, dan bagaimana hal ini dapat dikategorikan untuk tujuan analisis sangat diperlukan. Berdasarkan *International Council of Societies Industrial Design* (ICSID, 1977) menulis beberapa komponen yang dapat menarik kedatangan para wisatawan ke lokasi wisata atau menarik minat penduduk setempat untuk turut menikmati atraksi yang ditawarkan oleh obyek wisata tersebut, yaitu :

- Berpesiar
Berpesiar misalnya berkeliling daerah selama sehari-hari dengan karavan, motor, mobil, sepeda, perahu, kapal pesiar dan sebagainya.
- Aktivitas
Aktivitas misalnya kegiatan berburu, menembak, memancing, berselancar, mendaki gunung, bersepeda, berperahu kano, ski air, hiking, *tea-walk* dan sebagainya.
- Struktur buatan manusia (*man made structure*)
Struktur buatan manusia misalnya etnis dan agama, bangunan-bangunan yang megah dan taman-taman yang indah, arsitektur dan arkeologi, galeri dan museum, dan sebagainya.
- Peristiwa atau acara khusus
Peristiwa atau acara khusus misalnya kontes olahraga, pertunjukan seni dan budaya, pameran, dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata untuk periode yang singkat.
- Fisik alam
Fisik alam biasanya merupakan obyek wisata alam seperti gunung, sungai, laut, hutan, flora dan fauna, danau, pantai, lembah, kawah dan lain-lain.

2. Sarana pariwisata

Menurut Karyono, A. Hari (1997;74-77), pelayanan adalah faktor yang utama dalam pengembangan kepariwisataan. Salah satu faktor yang menentukan dalam pelayanan adalah kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan. Sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik

secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan. Sarana kepariwisataan dibagi menjadi :

- a. Sarana Pokok Kepariwisata adalah perusahaan yang kehidupannya bergantung pada arus kedatangan orang yang melakukan perjalanan, yang terdiri dari travel agent dan tour operator, perusahaan angkutan wisata, hotel dan jenis akomodasi lainnya, restoran/rumah makan, obyek wisata dan atraksi wisata.
- b. Sarana Pelengkap Kepariwisata adalah perusahaan/tempat yang menyediakan fasilitas rekreasi yang fungsinya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dan membuat para wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu DTW, meliputi : sarana olah raga, sarana hiburan (panggung hiburan), taman bermain,
- c. Sarana Penunjang Kepariwisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok. Berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal yang lebih penting yaitu agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan uangnya ditempat yang dikunjunginya, meliputi sarana perbelanjaan

3. Prasarana wisata

Prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sehingga memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Prasarana kepariwisataan dibagi menjadi :

- a. Prasarana Umum, meliputi
 - Sistem penyediaan air bersih
 - Kelistrikan
 - Jalur-jalur lalu lintas
 - Sistem pembuangan limbah
 - Sistem telekomunikasi
- b. Kebutuhan pokok pola hidup modern, prasarana ini merupakan prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak, misalnya rumah sakit, apotek, bank, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kantor pemerintah dan pompa bensin.
- c. Prasarana Wisata, merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi wisatawan, meliputi tempat penginapan, kantor informasi, tempat promosi, tempat rekreasi dan sarana transportasi penunjang.

4. Jasa pariwisata

Jasa pariwisata, sebagaimana jasa lainnya memiliki sifat khas, yaitu tidak bisa ditimbun dan akan dikonsumsi pada saat jasa tersebut dihasilkan (Yoeti, 1996:80). Berdasarkan sifat ini maka dapat dikatakan bahwa jasa pariwisata adalah pelayanan

wisata yang diberikan kepada wisatawan. Analisis terhadap pelayanan wisata merupakan hal penting karena pengeluaran yang dihabiskan oleh wisatawan untuk membayar pelayanan memberikan input utama dalam analisa ekonomi pariwisata (Gunn, 1998). Jasa pariwisata meliputi jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata (UU No. 9 Tahun 1990). Komponen pelayanan jasa wisata yang dikaji dalam studi ini meliputi :

- Pusat informasi
Komponen-komponen pariwisata mengelompokkan informasi dan promosi sebagai pelayanan yang sejalan. Adanya informasi akan mendorong orang untuk memberikan penilaian yang berkaitan dengan pengalaman dari perjalanan wisata yang akan mereka lakukan, dan penilaian ini akan mempengaruhi keputusan pilihan tujuan wisata mereka (Gunn, 1988). Informasi yang diberikan harus memberikan nilai promosi yang menggambarkan daya tarik obyek wisata sehingga menarik minat wisatawan untuk berwisata ke suatu tempat. Jenis-jenis material promosi seperti brosur, *booklets*, *guide-book*, *folder*, *leaflets*, dan lain-lain (Yoeti, 1996:192-193). Material promosi ini juga bisa disediakan oleh biro perjalanan wisata untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
- Pemandu wisata
Sistem kepariwisataan untuk bentuk-bentuk tertentu, memerlukan jenis-jenis fasilitas dan pelayanan wisata khusus. Berkaitan dengan wilayah studi yang memiliki daya tarik wisata berupa aktivitas jelajah alam, maka diperlukan suatu jasa pemandu wisata yang berperan sebagai penunjuk jalan bagi pengunjung yang melakukan aktivitas penjelajahan tersebut.

2.3.2 Komponen permintaan (demand)

Wahab *dalam* Tulung (1984:87) menguraikan bahwa pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada pasar (wisatawan). Salah satu konsepnya adalah mengenai 'motivasi wisatawan' dan 'kepuasan wisatawan' yang dijadikan pertimbangan utama pengembangan pariwisata, menggantikan cara historis yang berorientasi pada produk. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan permintaan (*demand approach*).

Kini, permintaan dan masukan wisatawan menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan pariwisata. Walaupun demikian, permintaan tersebut tetap

memperhatikan sisi penyediaan dan kondisi umum setiap objek wisata karena tidak semua permintaan pengunjung dapat dipenuhi atau harus dipenuhi. Proses mengenali dan menemukan keinginan/ permintaan wisatawan tersebut kemudian diarahkan pada penciptaan atau modifikasi komponen penyediaan yang sesuai dengan permintaan pengguna dan bukan sebaliknya (Collier, 1995:203).

Untuk mengembangkan pariwisata di kawasan wisata Pantai Watu Ulo yang sesuai dengan permintaan pasar/ wisatawan, maka dalam penelitian, pendekatan yang digunakan ialah *demand approach* yang akan dibagi dalam tiga kategori, yaitu *actual*, *latent*, dan *deferred demand*.

1. Wisatawan

Selain wisatawan, dikenal pula terminologi pengunjung. *World Tourism Organization* (WTO), 2001 mendefinisikan pengunjung sebagai satu atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dan atau tinggal di suatu tempat di luar wilayah tempat tinggalnya, baik negara, provinsi, kota, ataupun desa selama tidak lebih daripada satu tahun, dengan tujuan bisnis, mengisi waktu luang ataupun tujuan lainnya (Wood, 2002:9). Istilah pengunjung memiliki perbedaan dalam pelaku perjalanan wisatanya yaitu : wisatawan yaitu pengunjung sementara yang menetap sedikitnya 24 jam di lokasi kunjungan serta ekskursionis, yaitu pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24 jam di lokasi kunjungan, dan biasanya tidak menginap (Inskeep, 1991;19)

2. Masyarakat setempat

Masyarakat lokal adalah pihak yang akan menerima dampak paling besar dari kegiatan wisata yang dikembangkan didaerahnya. Aspirasi masyarakat setempat merupakan komponen permintaan yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rangka pengembangan suatu kegiatan wisata sehingga kegiatan wisata yang diselenggarakan tidak akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat lokal. Industri pariwisata akan memberi peluang bagi pemberdayaan sumber daya lokal dan menjadi stimulan *multiplier effects* positif bagi perekonomian dan kemajuan masyarakat lokal.

Supriana (1997) mengemukakan bahwa dengan adanya perusahaan pariwisata alam, peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan konservasi sumber daya alam dapat diharapkan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau bersama-sama pengusaha secara aktif maupun pasif. Peran serta aktif dilaksanakan secara langsung baik perorangan maupun bersama-sama secara terorganisir, yang secara sadar ikut

membantu program pemerintah dengan inisiatif dan berkreasi melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang terdapat dalam kegiatan pengusahaan pariwisata alam atau melalui pembinaan rasa memiliki sehingga tercipta hubungan timbal balik antara pemanfaatan dan kesempatan usaha.

Peran serta pasif yaitu timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam. Dalam peran serta pasif, masyarakat cenderung sekedar melaksanakan perintah mendukung terpeliharanya konservasi sumber daya alam. Upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat bersifat pasif dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun dialog dengan aparat pemerintah untuk membantu penyebaran pentingnya upaya kelestarian sumber daya alam di sekitar kawasan obyek wisata alam dimana juga mempunyai dampak positif terhadap perekonomian wilayah.

Keikutsertaan masyarakat sekitar kawasan obyek wisata alam, dapat berbentuk usaha dagang atau pelayanan jasa baik didalam maupun diluar kawasan onyek wisata, antara lain :

- jasa penginapan atau *homestay*
- penyediaan atau usaha warung makanan dan minuman
- penyediaan atau toko souvenir/cinderamata dari daerah tersebut
- jasa pemandu atau penunjuk jalan
- fotografi
- menjadi pegawai perusahaan wisata alam dan lain-lain.

2.4 Jenis-Jenis Pariwisata

Pariwisata dapat dibedakan jenisnya berdasarkan berbagai hal misalnya berdasarkan motif tujuan perjalanan dan jenis pariwisata berdasarkan obyek yang ditawarkan. Definisi jenis pariwisata dalam studi ini menggunakan definisi menurut *World Tourism Organization* (WTO, 2001) yaitu :

1. *Cultural Tourism*, merupakan jenis pariwisata yang memiliki daya tarik utama pada kebudayaan masyarakat setempatnya.
2. *Rural Tourism*, merupakan jenis pariwisata yang menjual suasana pedesaan dan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya yang biasanya memiliki keunikan tersendiri.
3. *Sun-beach Tourism*, merupakan jenis pariwisata yang menjual keindahan pantai sebagai daya tarik utamanya.

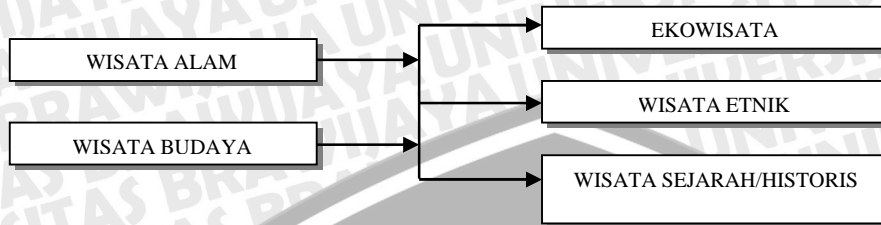
4. *Business Travel*, tempat yang menjadi daerah tujuan pariwisata jenis ini biasanya memiliki fasilitas perdagangan yang lengkap, dengan para pengunjungnya dan biasanya terkait dengan motif *Business Tourism*.
5. *Fitness-Wellness and Health Tourism*, daya tarik utama yang dicari oleh para pengunjung jenis pariwisata ini adalah berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan olahraga maupun pemeliharaan kesehatan, contohnya *fitness center* dan *health spa*.
6. *Nature Tourism*, merupakan pariwisata yang memiliki sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam dan unik sebagai faktor daya tarik utama bagi pengunjungnya. *Nature Tourism* terbagi atas dua jenis pariwisata yaitu :
 - *Adventure Tourism*, merupakan pariwisata yang memiliki sumber daya alam yang relatif belum tersentuh atau rusak oleh manusia dengan menawarkan berbagai kegiatan pariwisata yang bersifat tantangan ataupun petualangan.
 - *Ecotourism*, merupakan pariwisata yang memiliki interaksi dengan alam yang juga digabungkan dengan keinginan untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata.

2.5 Tinjauan Wisata Alam

2.5.1 Definisi wisata alam

Wisata alam dapat diartikan sebagai suatu bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli maupun setelah ada perpaduan dengan daya cipta manusia. Sedangkan obyek wisata alam adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun setelah ada perpaduan dengan daya cipta manusia, yang mempunyai daya tarik untuk dilihat dan dikunjungi wisatawan (Sumarja, 1988 dalam Fandeli, 2001).

Sedangkan pengertian wisata alam tidak lagi merupakan wisata yang berdasar pada pemanfaatan sumber daya alam melainkan lebih pada pengertian pengamatan sumber daya alam secara lebih mendalam (Fandeli, 2001). Walaupun berbagai penggunaan terminologi wisata alam sudah sedemikian meluas, namun definisi atau pengertiannya seringkali belum jelas. Selanjutnya pembagian kerangka tipe kepariwisataan dan interaksinya sebagai suatu dasar pijak adalah dengan dua tipe pembagian yaitu wisata alam dan wisata budaya yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain.



Sumber: Fandeli, 2001

Gambar 2.1 Diagram kaitan antara wisata alam dan wisata budaya

2.5.2 Pola kegiatan wisata alam

Kegiatan wisata alam dapat dilakukan dengan kondisi kesehatan dan usia yang berbeda, dari anak-anak hingga orang tua. Secara garis besar, pola kegiatan wisata alam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pola kegiatan wisata alam

No	Jenis kegiatan	Kriteria
1.	Berkendaraan mobil	Untuk kesenangan
2.	Berjalan kaki	Pada jenis ini terdapat dua bentuk yaitu bersantai dan berjalan lebih serius (<i>hiking</i>)
3.	Bermain di dalam ruang	Pada umumnya di lingkungan yang tidak alami, hasil binaan tanpa peralatan tertentu
4.	Berenang (<i>Swimming</i>)	Kegiatan wisata alam ini dilakukan tidak di kolam renang buatan
5.	Bersepeda (<i>Bicycling</i>)	Santai. Pada saat ini banyak dilakukan sepeda gembira. Bukan untuk berprestasi
6.	Memancing (<i>Fishing</i>)	Ada dua macam memancing, di kolam buatan dan di perairan alam. Pada wisata alam lebih ditekankan pada perairan alam
7.	Studi alam arkeologi	Mempelajari artefak dan ekofak di alam
8.	Perjalanan penjelajahan	Ada dua pola yaitu menjelajah alam dengan dipandu dan tidak dipandu
9.	Berlayar (<i>Boating/Sailing</i>)	Baik di perairan sungai, danau, waduk, ataupun di laut menggunakan peralatan dan mesin.
10.	Berperahu/berkano (<i>Canoeing</i>)	Berperahu di perairan sungai, danau dan pantai
11.	Melihat-lihat (<i>Sightseeing</i>)	Biasanya untuk melihat budaya masyarakat dan pemandangan alam di kota/desa
12.	Menelusuri goa (<i>Caving</i>)	Goa alam yang ada di daerah kapur ditelusuri sampai di zona gelap
13.	Berburu (<i>Hunting</i>)	Ada beberapa jenis dan macam hewan liar yang diburu
14.	Mengendarai kuda (<i>Horseback riding</i>)	Termasuk penjelajahan dan penelusuran alam dengan kuda
15.	Berkemah (<i>Camping</i>)	Termasuk berkemah tidak menginap (harian). Untuk kemah harian ini sulit dibedakan dengan piknik
16.	Piknik	Pergi berwisata tidak menginap
17.	Ski es	Hanya untuk di alam
18.	Mendaki gunung (<i>Mountaineering /Climbing</i>)	Kegiatan ini termasuk memanjat tebing dan Kawah gunung
19.	Jungle trekking	Lintas alam di hutan
20.	Olahraga motor (<i>Motor trailing</i>)	Mendaki gunung, menelusuri hutan dengan motor
21.	Ski air	Dilakukan di danau, waduk dan di pantai
22.	Selancar	Dilakukan di pantai
23.	Bergantung	Kegiatan ini ada mulai tahun 1970

No	Jenis kegiatan	Kriteria
24.	Terbang layang (<i>Gantole</i>)	Akhir-akhir ini mulai banyak digemari
25.	Menyelam (<i>Diving</i>)	Di perairan laut yang jernih airnya

Sumber: Fandeli, 2001:140

2.5.3 Wisata alam di kawasan konservasi

Kawasan konservasi merupakan area lindung yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Terhadap zona inti ini tidak diperbolehkan menambah jenis tumbuhan dan satwa yang tidak asli. Terhadap zona pemanfaatan dapat dibangun sarana kepariwisataan.

Hartono (1988) dalam Fandeli (2001) mencoba mengklarifikasi potensi obyek wisata alam yang terdapat di kawasan konservasi sumberdaya hutan menjadi 3 kelompok:

a) Flora dan fauna

Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang tinggi dengan berbagai keunikan, kecantikan dan kekhasannya sehingga menarik untuk dikunjungi dan dilihat.

b) Keunikan dan kekhasan ekosistem

Sesuai dengan keadaan geografis kawasan yang sangat bervariasi, keberadaan ekosistem di dalamnya akan menunjukkan kekhasan tersendiri.

c) Gejala atau fenomena alam

Potensi obyek wisata alam lainnya adalah berupa fenomena alam atau gejala alam yaitu berupa: kawah, sumber air panas, air terjun, danau, gua, batu-batuan yang berukuran besar, dan gejala atau fenomena alam lainnya.

Keanekaragaman potensi yang dimiliki oleh masing-masing obyek wisata alam di kawasan hutan dapat menciptakan aneka ragam kegiatan wisata alam. Kegiatan yang dapat dilakukan di obyek wisata alam taman nasional, hutan wisata dan kawasan wisata alam serta kawasan konservasi lainnya antara lain: berkemah, berenang, menyelam, mendaki gunung, rekreasi santai, bersampan, memotret, penelitian, memancing, berburu dan lain-lain.

2.6 Tinjauan Kemampuan Lahan (*Land Capability*)

2.6.1 Kemampuan Lahan

Lahan merupakan lingkungan fisik yang meliputi iklim, relief, tanah, hidrologi, dan vegetasi. Faktor-faktor ini hingga batas tertentu mempengaruhi potensi dan kemampuan lahan untuk mendukung suatu tipe penggunaan tertentu.

Dalam konteks evaluasi sumberdaya lahan dikenal ada dua macam istilah, yaitu *capabilitas* (kemampuan) lahan dan *suitabilitas* (kesesuaian) lahan. Kemampuan lahan dianggap sebagai kapasitas inherent dari sumberdaya lahan untuk mendukung penggunaannya secara umum; sedangkan kesesuaian lahan mencerminkan kesesuaian bidang lahan bagi penggunaan yang spesifik. Pendapat lain menyatakan bahwa kemampuan lahan lebih mengarah kepada aspek konservasi, sedangkan kesesuaian lahan lebih mengarah kepada produktivitas.

Pengertian lain menjelaskan bahwa kemampuan lahan adalah klasifikasi lahan dalam hubungannya dengan tingkat resiko kerusakan akibat penggunaan tertentu (FAO, 1976 dalam Jamulya, dkk. 1991). Upaya klasifikasi ini melibatkan survei tertentu. Survei kemampuan lahan merupakan salah satu survei sumberdaya lahan yang bertujuan mengetahui kemampuan lahan suatu daerah dan menentukan penggunaan lahan beserta pengelolaannya yang tepat sehingga dapat dicapai produktivitas yang optimal atau sedikit menimbulkan kerusakan lahan.

Berdasarkan hasil survei kemampuan lahan tersebut, maka dapat dilakukan proses evaluasi kemampuan lahan. Evaluasi kemampuan lahan merupakan proses menduga potensi sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaan. Lebih lanjut, evaluasi kemampuan lahan ialah salah satu komponen penting dalam proses perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*). Hasil evaluasi lahan akan memberikan alternatif penggunaannya serta tindakan-tindakan pengelolaan yang diperlukan agar lahan dapat dipergunakan secara lestari sesuai dengan hambatan atau ancaman yang ada.

2.6.2 Klasifikasi Kemampuan Lahan

Klasifikasi kemampuan lahan menurut Arsyad (1989) adalah penilaian komponen-komponen lahan secara sistematis dan pengelompokan ke dalam berbagai kategori berdasar sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan lahan. Ada dua cara dalam menyajikan kemampuan lahan yaitu:

1. membuat kelas kemampuan lahan
2. menyajiakan potensi tanah secara apa adanya tanpa membuat kelas kemampuan lahannya.

Agar dapat menggunakan lahan sesuai dengan kemampuannya, langkah pertama yang harus dikerjakan adalah melakukan penyelidikan dan penilaian sifat-sifat tanah yang menentukan daya guna lahan, kemudian mengelompokkan atau menggolongkan lahan tersebut ke dalam kelompok atau golongan yang mempunyai sifat dan kemampuan yang relatif sama. Pekerjaan ini disebut klasifikasi kemampuan lahan (*Land Capability Classification*) (Utomo, 1989:55).

Berdasarkan SK. MENTAN No. 837/Kpts/UM/II/1980 dan No. 683/Kpts/UM/II/1981, penggunaan lahan dibagi menjadi lima kawasan peruntukan, yaitu :

1. Kawasan Lindung;
2. Kawasan Penyangga;
3. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan;
4. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim; dan
5. Kawasan Permukiman

Faktor pembatas yang digunakan untuk klasifikasi ini adalah :

a. *Kemiringan Lereng* (dinyatakan dalam satuan persen) :

- | | | | |
|---------------|-----------|----------------|----------------|
| ▪ Kelas I = | 0 – 8 % | (Datar) | Nilai Skor 20 |
| ▪ Kelas II = | 8 – 15 % | (Landai) | Nilai Skor 40 |
| ▪ Kelas III = | 15 – 25 % | (Agak Curam) | Nilai Skor 60 |
| ▪ Kelas IV = | 25 – 45 % | (Curam) | Nilai Skor 80 |
| ▪ Kelas V = | > 45 % | (Sangat curam) | Nilai Skor 100 |

b. *Faktor jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi* :

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| ▪ Kelas I = | Aluvial, tanah Glei,
Planosol, Hidromorf Kelabu,
Laterik Air Tanah (Tidak peka) | Nilai Skor 15 |
| ▪ Kelas II = | Latosol (Agak peka) | Nilai Skor 30 |
| ▪ Kelas III = | Brown Forest Soil,
Non Calcic Brown,
Mediteran (Agak peka). | Nilai Skor 45 |
| ▪ Kelas IV = | Andosol Laterik, Grumosol,
Podsoil, Podsolik (Peka) | Nilai Skor 60 |
| ▪ Kelas V = | Regosol, Litosol, Atnogosol,
Renzine (Sangat Peka) | Nilai Skor 75 |

c. *Faktor Intensitas Hujan Harian* :

- Kelas I = $\leq 13,6 \text{ mm/hari}$ (sangat rendah) Nilai Skor 10
- Kelas II = $13,6 - 20,7 \text{ mm/hari}$ (rendah) Nilai Skor 20
- Kelas III = $20,7 - 27,7 \text{ mm/hari}$ (sedang) Nilai Skor 30
- Kelas IV = $27,7 - 34,8 \text{ mm/hari}$ (tinggi) Nilai Skor 40
- Kelas V = $> 34,8 \text{ mm/hari}$ (sangat tinggi) Nilai Skor 50

Dengan menjumlahkan skor ketiga faktor tersebut maka dapat ditetapkan penggunaan lahan pada setiap kawasan adalah sebagai berikut :

A. Kawasan Lindung

Areal dengan jumlah nilai skor untuk kemampuan lahan sama dengan atau lebih dari 175. atau memenuhi salah satu atau beberapa syarat berikut :

- Mempunyai lereng lapang $>45\%$;
- Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah Regosol, Litosol, Organosol, dan Renzine dengan lereng $>45\%$;
- Merupakan jalur pengaman aliran sungai/air sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai/aliran air tersebut;
- Mempunyai ketinggian 2000 meter di atas permukaan air laut;
- Guna keperluan/kepentingan khusus dan diterapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung.

B. Kawasan Penyangga

Areal dengan jumlah nilai skor untuk kemampuan lahannya 124 – 174 dan atau memenuhi beberap kriteria umum, sebagai berikut :

- Keadaan fisik areal memungkinkan untuk dilakukan budidaya secara ekonomis;
- Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan penyangga;
- Tidak merugikan segi-segi ekologi lingkungan.

C. Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan

Areal dengan jumlah nilai skor untuk kemampuan lahannya 124 ke bawah serta cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman tahunan (kayu-kayuan, tanaman perkebunan dan tanaman industri). Disamping itu areal tersebut harus memenuhi kriteria umum untuk kawasan penyangga.

D. Kawasan Budidaya Tanaman Semusim Setahun

Areal dengan kriteria seperti dalam penetapan kawasan budidaya tanaman tahunan akan tetapi areal tersebut cocok atau seharusnya dikembangkan usaha tani tanaman semusim/setahun.

E. *Kawasan Permukiman*

Areal yang memenuhi kriteria budidaya cocok untuk areal permukiman serta secara mikro mempunyai kelerengan 0 – 8 %.

2.7 Teori Analisis Pariwisata

2.7.1 Analisis linkage system

Keterkaitan mengacu pada berbagai macam interaksi dan saling hubungan antara kegiatan ekonomi di suatu wilayah, dan untuk membantu penelaahan berbagai hubungan kegiatan dalam suatu wilayah, dibuatkan klasifikasi hubungan-hubungan sederhana, antara lain (Wibawa, 2004:29-35) :

1. Hubungan-hubungan vertikal

Jika *output* suatu kegiatan di suatu wilayah merupakan *input* atau masukan untuk kegiatan lainnya, maka biaya pengangkutan akan berkurang dengan saling berdekatnya dua jenis kegiatan tersebut. Kehadiran kegiatan semacam itu dalam suatu wilayah akan menambah daya tarik wilayah tersebut sebagai tempat lokasi bagi kegiatan lainnya. Rangkaian yang bersifat vertikal (*vertikal linkage*) akan merupakan penarikan kegiatan-kegiatan secara timbal balik yang mempunyai kekuatan yang sama dari kedua arah, yang bersifat mengarah ke belakang (*backward*) dan mengarah ke muka (*forward*).

2. Hubungan-hubungan horizontal

Peranan hubungan horizontal, termasuk di dalamnya masalah persaingan antar kegiatan atau unit-unit kegiatan, baik untuk pasar dan juga untuk input. Berbeda dengan penarikan secara timbal balik yang terdapat pada hubungan-hubungan vertikal, maka efek lokasi dari hubungan-hubungan horizontal dalam hal ini lebih merupakan penolakan kegiatan timbal balik. Bila dikaitkan dengan pertumbuhan dan pembangunan wilayah adalah persaingan kegiatan yang berbeda dari sumber-sumber lokal yang langka dan sulit dikembangkan. Hubungan horizontal ini akan lebih menekankan hubungan antara pelaku-pelaku kegiatan dan kebijaksanaan yang ada. Semua kebijaksanaan wilayah yang dapat digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, yang harus dihadapi oleh setiap penduduk, lembaga-lembaga yang bertanggung

jawab dan berwenang langsung serta perencana-perencana kota atau perencana wilayah secara lebih luas. Kebijakan tersebut akan timbul akibat dari rangkaian kegiatan secara horizontal dalam bentuk persaingan antar penggunaan sumber-sumber setempat yang langka.

3. Hubungan-hubungan komplementer

Bahasan tentang hubungan-hubungan komplementer di antara berbagai kegiatan dalam suatu wilayah pada hakikatnya selalu dikaitkan dengan masalah yang berhubungan dengan penghematan ekstern (*Location Patterns*). Efek lokasi merupakan penarikan kegiatan secara timbal balik, jika penambahan satu kegiatan di dalam sebuah wilayah, merangsang pertumbuhan dari kegiatan yang komplementer (saling melengkapi).

2.7.2 Analisis partisipatif

Bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaku-pelaku yang berbeda beserta kepentingannya terhadap suatu rencana, program atau proyek sehingga diperoleh gambaran mengenai semua lembaga dan kelompok yang berperan di daerah tersebut, menyelidiki kepentingan atau prioritas pihak-pihak tersebut, meneliti kekhawatiran dan konflik antara kelompok yang berbeda serta memberikan wawasan terhadap potensi dan kelemahan yang dimiliki setiap kelompok, dan menelaah konsekuensi dan implikasi yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan

Tabel 2. 2 Matriks Analisis Partisipatif

No.	Kelompok	Kepentingan	Kekhawatiran	Konflik	Potensi	Kelemahan	Implikasi
1							
...							
n							

Sumber : Wicaksono dan Sugiarto, 2001

Keterangan masing-masing kolom:

1. Kelompok; yaitu semua kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan sesuai dengan usaha atau bidang mata pencaharian, minat, dan fungsi.
2. Kepentingan; yaitu keinginan atau harapan kelompok tersebut yang berhubungan dengan bidang usaha mereka yang perlu diperhatikan oleh perencana.
3. Konflik; untuk menampung kepentingan yang bertentangan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
4. Potensi; yaitu potensi yang dimiliki masing-masing kelompok

5. Kelemahan; yaitu hal-hal yang sangat penting bagi keberhasilan kelompok tertentu namun hal tersebut berbeda diluar kemampuan atau control kelompok yang dimaksud
6. Implikasi/konsekuensi; diperlukan untuk mengisi implikasi dan atau konsekuensi bagi perencana untuk menampung dan merencanakan program, menanggulangi kelemahan dan merealisasi potensi yang ada dalam kelompok tersebut

2.7.3 Analisis SWOT (strength, weakness, opportunity and threat)

Analisis SWOT adalah analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi obyek, yaitu untuk melihat strength (kekuatan), weakness (kelemahan), oportunity (peluang), dan threat (ancaman), serta menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut adalah (Yoeti, 1996:131-135):

- Kekuatan (strenght); kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh sehingga dapat bertahan di pasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri.
- Kelemahan (weakness); segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yang datang dari dalam wilayah atau obyek itu sendiri.
- Peluang (opportunity); kesempatan yang berasal dari wilayah studi. Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan, atau kondisi ekonomi secara global.
- Ancaman (threat); hal yang dapat mendatangkan kerugian yang berasal dari luar wilayah atau obyek.

Keempat faktor tersebut masing-masing dianalisis berdasarkan komponen dari tiap faktor untuk selanjutnya diberikan penilaian untuk mengetahui posisi obyek penelitian pada kuadran SWOT. Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk matrik kepada dua kelompok besar yaitu faktor internal (IFAS/*Internal Strategic Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal (EFAS/*Eksternal Strategic Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

A. Matrik IFAS

Cara penentuan IFAS menurut Rangkuti (2001:24) adalah :

- 1) Kolom 1 disusun 5-10 faktor-faktor kekuatan dan kelemahan.

- 2) Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), dengan ketentuan angka 1 dibagi kepada seluruh faktor.
- 3) Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi obyek penelitian.
- 4) Variable yang bersifat positif (semua variable yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata obyek lain atau dengan pesaing utama. Sedangkan variable yang bersifat negatif, kebalikannya. Misalnya, jika kelemahan obyek penelitian besar sekali dibandingkan dengan rata-rata obyek lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika kelemahan obyek penelitian dibawah rata-rata obyek lain, nilainya adalah 1.
- 5) Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan.
- 6) Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi obyek penelitian yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana obyek penelitian tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

B. Matrik EFAS

Cara penentuan EFAS menurut Rangkuti (2001:22) adalah :

- 1) Kolom disusun 5-10 faktor-faktor peluang dan ancaman.
- 2) Masing-masing faktor dalam kolom 2 diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), dengan ketentuan angka 1 dibagi kepada seluruh faktor.
- 3) Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi obyek penelitian.
- 4) Variable yang bersifat positif (semua variable yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata obyek lain atau dengan pesaing utama. Sedangkan variable yang bersifat negatif, kebalikannya. Misalnya, jika kelemahan obyek penelitian besar sekali dibandingkan dengan rata-rata obyek lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika kelemahan obyek penelitian dibawah rata-rata obyek lain, nilainya adalah 1.
- 5) Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan.

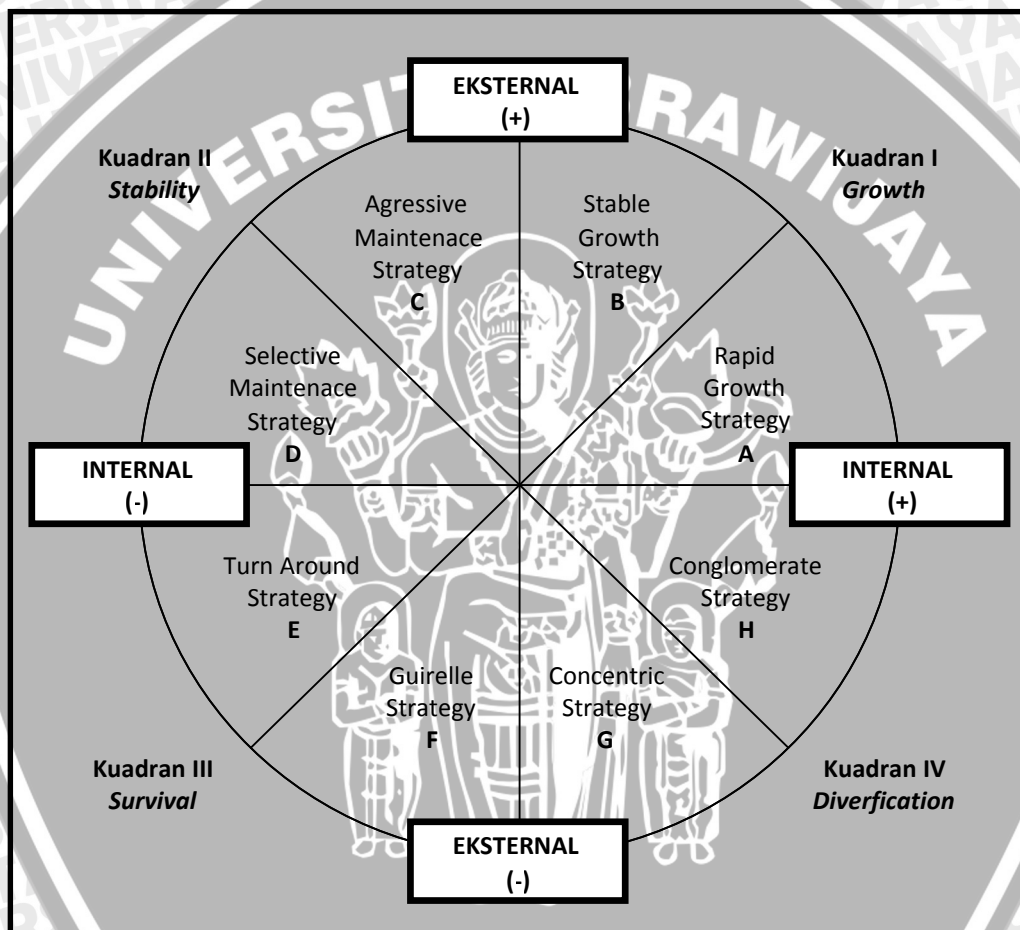
- 6) Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan bagi obyek penelitian yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana obyek penelitian tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

C. Kuadran SWOT

Dari penilaian IFAS dan EFAS diketahui posisi obyek penelitian dalam koordinat pada sumbu x dan y, sehingga diketahui posisinya sebagai berikut (Yoeti, 1996:143) :

- 1) Kuadran I (growth), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 - a. Ruang A dengan Rapid Growth Strategy yaitu strategi aliran pertumbuhan cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat.
 - b. Ruang B dengan *Stable Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi.
- 2) Kuadran II (stability), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 - a. Ruang C dengan Agresif Maintenance Strategy dimana pengelola obyek melaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif.
 - b. Ruang D dengan Selective Maintenance Strategy dimana pengelola obyek dengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting.
- 3) Kuadran III (survival), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 - a. Ruang E dengan Turn Around Strategy yaitu strategi bertahan dengan cara tambal sulam untuk operasional obyek.
 - b. Ruang F dengan Guirelle Strategy yaitu strategi gerilya, sambil operasional dijalankan, diadakan pembangunan atau usaha pemecahan masalah dan ancaman.
- 4) Kuadran IV (*diversification*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu :
 - a. Ruang G dengan Concentric Strategy, yaitu strategi pengembangan obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak.

- b. Ruang H dengan Conglomerate Strategy, yaitu dengan strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor. (gambar 2.1)



Gambar 2. 2 Pembagian Ruang Dalam Analisis SWOT

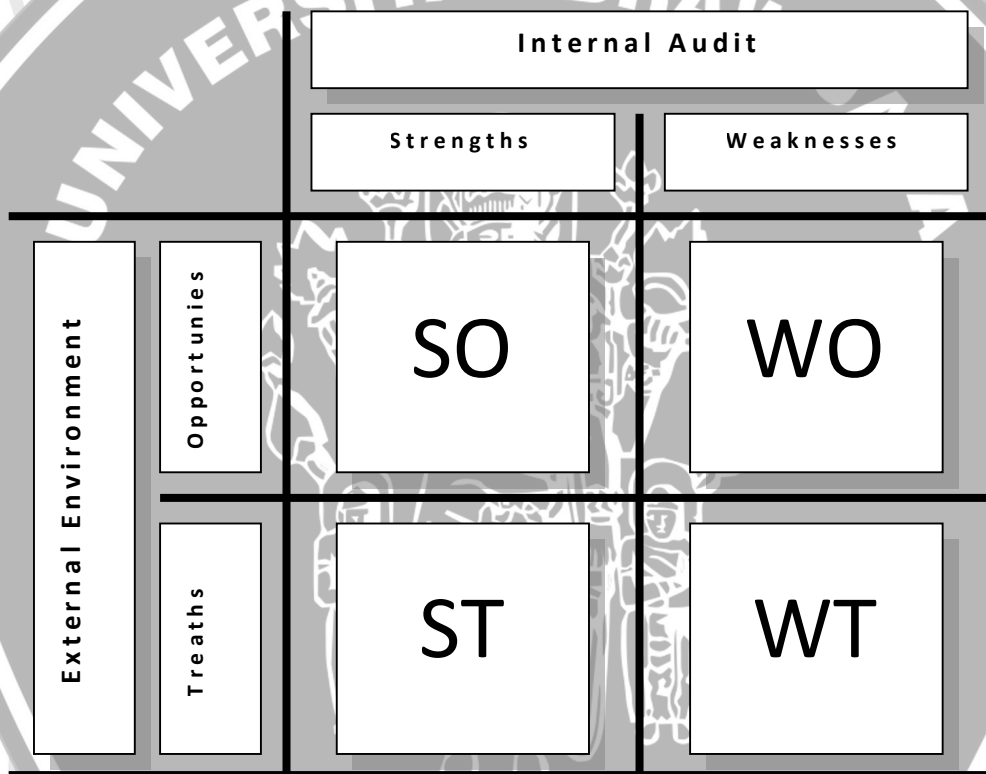
D. Matriks SWOT

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui strategi dasar pemecahan masalah yang dapat diterapkan secara kualitatif. Adapun cara yang dilakukan adalah:

- 1) SO : Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk meraih peluang (O).



- 2) ST : Staretegi/ alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan kekuatan (S) secara maksimal untuk mengantisipasi ancaman (T) dan berusaha menjadikan maksimal menjadi peluang (O).
- 3) WO : Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk meraih peluang (O).
- 4) WT : Strategi/ alternatif pemecahan masalah dengan meminimalkan kelemahan (W) untuk menghindari secara lebih baik dari ancaman (T). (gambar 2.2)



Sumber: Wicaksono & Sugiarto, 2001

Gambar 2. 3 Matriks SWOT

2.8 Analisis Tapak

2.8.1. Kriteria tapak tepi laut

Kriteria tapak tepi laut alamiah memiliki beberapa sifat khas yang menyenangkan direncanakan dan diprogram untuk kegiatan yang berciri air (Yuwono, 1993 dalam Priambudi, 2005) :

1. Sifat khas air.

Terdapat kualitas saniter, bebas bakteri dan mempunyai kejernihan fisik airnya agar terjamin keselarasan tapak lingkungan pantai.

2. Sifat khas kondisi air.
Sirkulasi air tidak mengganggu aktifitas dan lingkungan, arusnya tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu deras.
3. Sifat khas dasar.
Tidak ada rintangan di dasar laut dan bebas dari puing-puing batu, jerami, tanah dan lumpur. Dasar yang diharapkan adalah yang keras, berkerikil dan berpasir putih, yang relatif stabil dan tahan erosi.
4. Sifat khas iklim.
Iklim pantai umumnya panas diantisipasi dengan membuat bukaan yang idealnya menghadap ke rah tenggara untuk mengoptimalkan pemasukan sinar matahari.
5. Sifat khas lingkungan.
Pengaturan pola aktifitas, pengaturan bangunan, persil, penzoningan, tata gubahan, transportasi, utilitas, ekonomi, dan penduduk.
6. Sifat khas program.
Lokasi untuk aktifitas dapat dilindungi pembatas dan dipisahkan secara internal, agar memudahkan pencapaian dan pengawasan.
7. Sifat khas pencapaian.
Pencapaian visual sepanjang garis pantai sebaiknya terbebas dari tanaman penghalang dan fasilitas di laut atau tepi laut mudah tercapai.
8. Sifat khas daerah.
Daerah aktifitas tersedia luas dan terbagi menjadi beberapa ruang yang ditinjau dari kedalaman air dan sifat ukuran tapak kegiatan.
9. Sifat khas pantai.
Garis tepi pantai sepanjang laut harus bebas dari batuan penghalang dan terdapat jenis pohon berdaun sepanjang tahun untuk keteduhan tapak dan yang tidak mengotori tapak.

2.8.2 Penataan Ruang Luar

Menurut Hakim (2002), fungsi sosial ruang terbuka antara lain adalah :

1. Tempat bermain dan berolahraga

Tempat bermain (*Play ground*) sebagai tempat bermain untuk anak-anak yang dilengkapi oleh berbagai macam wahana permainan seperti ayunan, papan seluncur, Tagada, Space shuttle, bumper car, mini train, serta arena ketangkasan. Sedangkan untuk olahraga yang cocok untuk wisata pantai yaitu lapangan sepak bola, voli, kolam renang. *outbond*. Pada pantai-pantai yang bias dimanfaatkan juga bias digunakan olahraga laut seperti *surfing, diving, snorkelling*.

2. Tempat bersantai

Restaurant, kios pedagang makanan, kolam pancing, *camping ground*, dan penginapan merupakan sarana tempat bersantai dalam kawasan wisata. Keberadaan sarana tersebut dinilai dapat menunjang kebutuhan pengunjung yang ingin relax menghilangkan kepenatan.

3. Tempat berkomunikasi social

Taman atau open space bias dijadikan tempat untuk berinteraksi social antar pengunjung, dengan menambahkan tempat duduk dan pemandangan taman yang apik sehingga pengunjung merasa nyaman.

4. Tempat peralihan atau menunggu

Sarana yang dimaksud bias seperti plaza yang ditempatkan di center kawasan dengan dilengkapi taman yang dihiasi air mancur dan tempat duduk.

5. Tempat untuk mendapatkan udara segar dengan lingkungan

Gardu pandang merupakan fasilitas penunjang yang digunakan oleh pengelola yang perlu diadakan pada kawasan wisata pantai, karena bangunan ini berfungsi untuk melakukan pengawasan kepada para wisatawan yang melakukan kegiatan di pantai, mengingat kawasan wisata ini sering sekali memakan korban. Sementara untuk pengunjung bias menggunakan shelter maupun gazebo. *Shelter* sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada para wisatawan yang berupa tempat berteduh untuk menikmati pemandangan pantai dan dari sengatan matahari,

6. Sarana penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain

Tempat peralihan bias ditandai dengan adanya taman-taman kecil beserta tempat duduk dan petunjuk lokasi sehingga memudahkan pengunjung dalam pencapaian

7. Pembatas atau jarak diantara massa bangunan

Pembatas yang dimaksud disini bias berupa vegetasi semacam pohon-pohon besar untuk memisahkan antara ruang satu dengan yang lain. Selain itu keberadaan vegetasi juga bias sebagai paru-paru kawasan.

2.9 Mitigasi Bencana (*Tsunami*)

2.9.1 Definisi dan pengertian

Subandono dan Budiman(2006) menyebutkan istilah “tsunami” diadopsi dari bahasa Jepang, dari kata *tsu* yang berarti pelabuhan dan *nami* yang berarti ombak. Dahulu kala, setelah tsunami terjadi, orang-orang Jepang akan segera menuju pelabuhan untuk menyaksikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tsunami, sejak itulah dipakai istilah tsunami yang bermakna “gelombang pelabuhan”. Tsunami juga dikenal sebagai gelombang pasang berdimensi gunung, yang bergerak sepanjang samudera dengan kecepatan yang dapat mencapai 15 mil/jam (24,135 km/jam) dengan ketinggian bisa mencapai 50 kaki (15,24 meter), yang dapat menerjang kawasan pantai dan merusak infrastruktur masyarakat terkadang tanpa suatu peringatan atau tanda-tanda yang teramati.

Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, dan proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana-bencana yang benar-benar terjadi.

Bagian pertama dari suatu proses mitigasi adalah mendiskusikan konsep mitigasi dan secara ringkas meneliti cakupan bahaya-bahaya yang mungkin perlu dipertimbangkan, menggambarkan sifat-sifat bencana itu, konsekuensi-konsekuensinya dan tingkat kerentanan bencana. *Bagian kedua* menggambarkan tipe-tipe tindakan mitigasi yang mungkin memadai, termasuk rekayasa dan konstruksi, perencanaan fisik, ekonomi, tindakan-tindakan sosial dan institusional, mendiskusikan manfaat dan potensi batasan-batasannya dari masing-masing tipe bencana. *Bagian ketiga* adalah mempertimbangkan bagaimana berbagai tipe tindakan yang ada bisa digabungkan untuk membentuk satu strategi mitigasi bencana yang komprehensif, dan mendiskusikan peluang-peluang dan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan rencana-rencana mitigasi bencana. (Mitigasi Bencana UNDP dan DHA, 1994)

2.9.2 Morfologi pantai rawan tsunami

Saroso (2006) menerangkan tentang morfologi pantai rawan tsunami di Indonesia. Besar kecilnya kekuatan tsunami disamping ditentukan oleh kekuatan gempa, juga ditentukan oleh morfologi pantai. Hal-hal yang dapat diamati pada pantai adalah geometri, kelandaian, dan kekasaran serta vegetasi penutupnya, sedangkan nilai kerusakan lahan dan bangunan sangat terkait dengan penataan ruang dan bangunan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan gelombang pasang akibat tsunami antara lain :

1. Geometri pantai (arah horizontal)

Pantai yang memanjang tanpa lekukan mempunyai tinggi gelombang lebih rendah bila dibanding pantai berteluk. Pada pantai berteluk, tsunami bertambah cepat, besar dan tinggi akibat adanya penyempitan penampang basah, terlebih bila waktu getar gempa lebih panjang, maka menjadi besar dan tinggi.

2. Kelandaian pantai (arah vertikal)

Ada dua jenis kelandaian yang mencolok yaitu pantai landai dan pantai terjal dan dalam. Gelombang yang terjadi akibat tsunami yang tiba pada pantai relatif landai akan semakin membesar dan bertambah cepat dibandingkan pantai yang relatif dalam dan terjal.

3. Kekasaran pantai

Hal ini ditinjau dari sifat kekasaran suatu pantai, dimana dapat dibedakan dua jenis yaitu pantai kasar dan pantai halus. Pantai kasar dapat diartikan pantai yang berbukit-bukit, berbatu, berkarang dan atau ditutupi oleh vegetasi yang bervariasi sehingga bersifat kasar. Tipe pantai seperti ini dapat meredam energi tsunami, sedangkan pantai halus biasanya tersusun oleh endapan aluvial pantai dari pasir sedang sampai halus, dan tidak ditumbuhi oleh tanaman seperti pada pantai kasar. Pantai berpasir halus akan menimbulkan gelombang akibat tsunami lebih besar.

4. Pantai dengan muara sungai

Pada umumnya pantai di sini terjadi proses sedimentasi dari daratan melalui sungai, sehingga dijumpai adanya tanggul alam. Tanggul alam ini biasanya ditumbuhi vegetasi yang lebat. Tanggul alam dan vegetasi berperan besar dalam mereduksi energi tsunami yang melanda kampung di sekitar muara.

2.9.3 Mitigasi tsunami

Subandono (2006) menerangkan, terdapat upaya mitigasi di dalam mengatasi bencana tsunami dikenal menjadi dua bagian penting yaitu :

1. Mitigasi struktural

Upaya struktural dalam menangani bencana tsunami adalah upaya teknis yang bertujuan untuk meredam/mengurangi energi gelombang tsunami yang menjalar ke kawasan pantai. Mengingat tsunami menjalar secara frontal dengan arah tegak lurus bidang subduksi maka secara garis besar teluk-teluk dan pelabuhan-pelabuhan yang menghadang langsung ke zona subduksi dapat ditetapkan, dan trayek penjalaran tsunami ke teluk-teluk atau pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat diperkirakan.

Berdasarkan pemahaman mekanisme terjadinya tsunami, karakteristik gelombang tsunami, inventarisasi dan identifikasi kerusakan struktur akibat tsunami, upaya mitigasi bencana tsunami struktural dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu :

- Alami, seperti penanaman hutan pantai (cemara dan waru laut) atau hutan mangrove/*greenbelt* di sepanjang kawasan pantai dan perlindungan terumbu karang. Hutan mangrove, yang secara alamiahnya dijumpai di pantai-pantai daerah tropic, umumnya dapat hidup pada kondisi yang terus tergenang dengan tingkat salinitas yang tinggi. Hutan mangrove memiliki system perakaran yang kuat dan istimewa, tajuk yang ratadan rapat, dan berdaun lebat sepanjang waktu. Dengan sifat seperti itu mangrove dapat berfungsi ideal sebagai pelindung pantai alami dari gelombang tsunami maupun erosi. Daerah sepanjang garis pantai setebal 200 m perlu dihijaukan kembali dengan hutan mangrove dan pohon-pohon besar lainnya, seperti pohon kelapa yang berlapis-lapis. Batu-batu karang perlu dibiarkan tumbuh karena dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang alami.
- Buatan, seperti pembangunan pemecah ombak sejajar pantai untuk menahan tsunami, memperkuat desain bangunan serta infrastruktur lainnya agar tahan terhadap tsunami.

- Pembuatan pemecah gelombang (*break water*)

Salah satu cara secara structural melindungi pantai dari gelombang tsunami adalah membuat pemecah gelombang sejajar pantai, baik di laut maupun di darat (*Seawall*). Struktur tersebut harus stabil untuk menahan gaya-gaya hidrodinamika gelombang dan gaya-gaya lain yang timbul. Cara ini relative

mahal, namun pada kondisi tertentu cukup efektif untuk mengurangi atau mencegah bencana tsunami.

- Tempat perlindungan (*shelter*)
- Bukit Buatan (*artificial hill*)
- Struktur tahan tsunami (*retrofitting*)

Beberapa pedoman praktis yang dapat dipakai dalam perencanaan sistem struktur tahan tsunami adalah sebagai berikut :

(1) Sisi panjang dari struktur sedapat mungkin diarahkan sejajar dengan antisipasi arah penjalaran gelombang tsunami agar kekuatan lateral struktur pada arah tersebut relatif lebih besar, sementara gaya akibat tekanan air yang bekerja relatif lebih kecil, (2) *Shear wall* atau *Lateral bracing* ditempatkan searah dengan penjalaran gelombang tsunami, (3) Lantai terbawah dari bangunan bertingkat sebaiknya dibuat terbuka sama sekali atau dinding terbuat dari bahan mudah retak, agar gelombang tsunami dapat leluasa lewat sehingga mengurangi beban horizontal pada struktur, sementara lantai-lantai di atasnya digunakan untuk mengungsi/evakuasi, (4) Pondasi menerus memiliki ketahanan yang jauh lebih baik untuk menahan gerusan akibat arus air deras pada saat terjadi tsunami, (5) Sistem struktur juga harus tahan gempa, karena struktur akan terlanda gempa terlebih dahulu sebelum gelombang tsunami datang, (6) Struktur diperhitungkan terhadap benturan benda keras akibat tersapunya benda-benda pada saat tsunami menyerbu pantai.

2. Mitigasi non struktural

Upaya non struktural dalam menangani bencana tsunami adalah upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya. Upaya non struktural meliputi :

- Kebijakan tentang tata guna lahan kawasan pantai yang rawan bencana. Pada tempat-tempat yang berpotensi terjadi tsunami, penataan kembali lahan pantai perlu dilakukan. Pembangunan permukiman yang terletak terlalu dekat dengan garis pantai perlu dihindari. Salah satunya yaitu membuat peta risiko rawan *tsunami* yang dapat dan menyusun rencana zonasi wilayah pesisir sekaligus sebagai upaya mitigasi baik akibat alam maupun manusia.
- Kebijaksanaan tentang standarisasi bangunan (permukiman atau bangunan lainnya) serta infrastruktur sarana dan prasarana, seperti :

- Membuat pedoman konstruksi bangunan tahan gempa khusus untuk non-engineered buildings yang sesuai untuk wilayah pesisir pantai, dengan penyajian sederhana, praktis, informative dan mudah diikuti.
- Membuat pedoman cara perkuatan dan retrofitting bangunan yang sudah ada agar tahan gempa khusus untuk non-engineered buildings yang sesuai untuk wilayah pesisir.
- Kebijakan tentang eksplorasi dan kegiatan perekonomian masyarakat kawasan pantai
- Pendidikan, pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami
- Penyuluhan dan sosialisasi upaya mitigasi bencana tsunami kepada masyarakat
- Pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) adanya bahaya tsunami. Terdapat beberapa sistem peringatan dini yang sudah dikembangkan oleh berbagai negara yaitu : Radar Berfrekuensi Tinggi, Buoy Radar, Stasiun GPS, Sistem PTWC dan Model BMG

2.9.4 Evakuasi Tsunami

Strategi utama untuk segera menyelamatkan jiwa sebelum gelombang tsunami datang adalah mengevakuasi penduduk dari wilayah bahaya. Dua metode yang umumnya diterapkan:

- a. evakuasi horizontal, memindahkan penduduk ke lokasi-lokasi yang lebih jauh atau ke dataran yang lebih tinggi
- b. evakuasi vertical, memindahkan penduduk ke lantai-lantai lebih tinggi di dalam bangunan-bangunan akuasi horisontal dan tindakan darurat lainnya

2.9.5 Peran Evakuasi Vertikal Dalam Mengurangi Kerugian Tsunami

Mengevakuasi penduduk dapat menyelamatkan banyak jiwa dan mengurangi cedera, tetapi berefek rendah, jika pun ada, dalam mengurangi kerugian ekonomis dan properti. Pada wilayah-wilayah pesisir di mana kepadatan bangunan dan penghuninya tinggi; jalan, jembatan dan metode evakuasi horisontal lain terbatas; atau waktu peringatan tak mencukupi, maka dibutuhkan evakuasi vertikal sebagai alternatif atau tambahan bagi evakuasi horisontal.

2.9.6 Strategi Rencana Evakuasi Vertikal yang Spesifik untuk Mengurangi Dampak Tsunami bagi Warga

- Strategi 1

Identifikasi Bangunan-Bangunan Spesifik sebagai Tempat Perlindungan Vertikal

Beberapa bangunan yang telah ada dapat digunakan sebagai tempat perlindungan vertikal dan bangunan-bangunan baru dapat ditempatkan, dirancang, dan dikonstruksi, dengan pertimbangan penggunaan tersebut. Para petugas bangunan local dan konsultan pembangun dapat membangun menyusun daftar bangunan-bangunan potensial yang dimiliki masyarakat., mengevaluasi kemampuan ketahanan bangunan tersebut dari gempa maupun tsunami serta mengembangkan criteria standar untuk rehabilitasi atau konstruksi baru yang dapat menahan berbagai bahaya agar bangunan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat perlindungan.

- **Strategi 2**

Buat Persetujuan dan Prosedur dengan Pemilik Bangunan

Pada umumnya, bangunan untuk evakuasi vertikal disiapkan di dalam bangunan yang kepemilikannya pribadi. Agar suatu program dapat berjalan efektif, maka persetujuan yang tepat harus dinegosiasikan dengan para pemilik bangunan, dan mereka –baik pemilik maupun perwakilan- harus dilibatkan dalam perumusan dan pemeliharaan program.

- **Strategi 3**

Pastikan Adanya Prosedur untuk Menerima dan Menyebarkan Peringatan Bahaya

Bagi komunitas yang rentan tsunami, sangatlah penting untuk memiliki prosedur dan system yang memadai dalam pemberitahuan resmi, agar langkah-langkah tepat dapat diambil, terkadang beberapa jam sebelum datangnya tsunami dari jauh.

- **Strategi 4**

Terapkan Informasi yang Efektif dan Program-program Pendidikan

Masyarakat dapat menggunakan brosur, instruksi satu lembar, uji coba system peringatan secara berkala, informasi media cetak dan elektronik, sinyal-sinyal dan latihan respon keadaan darurat untuk terus menjaga pemahaman dan menanamkan perilaku respon yang efektif.

- **Strategi 5**

Pelihara Program Dalam Jangka Panjang

Tsunami merupakan peristiwa langka, namun berdampak besar pada penduduk di daerah pesisir. Merupakan sebuah tantangan untuk dapat menjaga program-program kesiapan dalam keadaan darurat berikut prosedur ketika ancaman tersebut diperkirakan

masih lama. Ukuran evakuasi vertikal menjadi penting untuk diintegrasikan ke dalam rencana-rencana respon penduduk dan ditinjau ulang serta direvisi secara teratur.

2.10 Kajian Studi Terkait

Studi-studi terdahulu merupakan studi yang pernah dilakukan yang dapat menambah wawasan bagi penyusun Hasil-hasil penelitian terdahulu juga digunakan sebagai perbandingan dan acuan dalam mengerjakan penelitian ini. (Tabel 2.3) :



Tabel 2. 3 Tinjauan Studi Terkait

Judul dan Peneliti	Metode Penelitian	Keterkaitan	Perbedaan
Evaluasi Tingkat Kerentanan Daerah Pesisir Kota Balikpapan Terhadap Bencana Tsunami (Achmad Bagus Nursandy, FT-PWK 2006)	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode evaluatif, untuk mengetahui tingkat kerentanan terhadap bencana tsunami dengan menggunakan variabel topografi, vegetasi, dan penggunaan lahan.	Keterkaitan dengan studi yang dilakukan terletak pada evaluasi terhadap tingkat kerentanan bencana tsunami, dimana variabel topografi dan vegetasi digunakan dalam penelitian pada objek wisata Pantai Watu Ulo, Kab. Jember	Perbedaan dengan studi yang dilakukan terletak pada pembahasan yang dilakukan lebih terfokus pada tingkat kerentanan Kota Balikpapan terhadap bencana tsunami, sedangkan pada studi yang akan dilakukan lebih terfokus pada penelitian pariwisata.
Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo Kabupaten Jember (Elin Deviana, FT-Arsitektur 2007)	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode perancangan Programatik, fungsional, tipologi, analogi dan kanonik untuk menganalisa fungsi, pelaku dan aktifitas, ruang, bangunan, tapak, tata massa dan ruang luar, utilitas. Serta menggunakan metode Intuitif dan pragmatic untuk mengkonsep dasar, fungsi, pelaku dan aktifitas, ruang, bangunan, tapak, tata massa dan ruang luar dan utilitas sehingga terbentuk suatu rancangan dalam bentuk desain dan maket	Keterkaitan dengan studi yang dilakukan terletak pada wilayah perencanaan yang sama disertai dengan tujuan yang akan dilakukan pada wilayah studi yaitu pengembangan	Perbedaan dengan studi yang dilakukan terletak pada pembahasan yang dilakukan lebih terfokus pada perancangan tatanan massa, sirkulasi, dan ruang luar yang mampu mawadahi dan memadukan fungsi wisata pantai yang mengoptimalkan potensi dan berwawasan lingkungan
Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Pantai Nala Kota Bengkulu (Andi Yuliansyah., FT-PWK, 2008).	Metode penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi fasilitas pendukung, merumuskan strategi pengembangan, dan menghasilkan arahan pengembangan yaitu metode analisis kualitatif (analisis lingkage	Keterkaitan dengan studi yang dilakukan terletak pada evaluasi terhadap tingkat kerentanan bencana tsunami, dimana variabel topografi dan vegetasi digunakan dalam penelitian pada objek wisata Pantai Watu Ulo, Kab. Jember	Perbedaan dengan studi yang dilakukan terletak pada lokasi dan karakteristik wilayah perencanaan sehingga arahan pengembangan tapaknya juga berbeda

system, supply-demand, partisipatif, SWOT, dan analisis sirkulasi), dan analisis kuantitatif dengan metode pembobotan dan skoring (analisis karakteristik lahan, pembobotan faktor SWOT, proyeksi pengunjung, dan kebutuhan ruang).

Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Bandalit Kabupaten Jember (Vendy Prayasdika Widharma, FT-PWK, 2008)

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis supply demand dengan masing-masing variable

Keterkaitan dengan studi yang dilakukan terletak pada metode analisis dan karakteristik wilayah perencanaan yaitu pesisir pantai

Perbedaan dengan studi yang dilakukan terletak pada output yang hanya sampai arahan pengembangan fisik dan nonfisik

Sumber : Studi Kepustakaan

